

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 ayat 4 disebutkan bahwa "RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat".

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021 -2026 pada tahun kedua, yang selanjutnya berfungsi sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

Untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Kabupaten/Kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Provinsi dan Pusat maka dilakukan pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Permendagri tersebut dijelaskan bahwa Pengendalian dan evaluasi RKPD meliputi: pengendalian kebijakan, pengendalian pelaksanaan dan evaluasi hasil. Dimana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD lingkup Kabupaten/Kota dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja OPD Kabupaten/Kota.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;

9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2022. Sedangkan tujuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan.

1.4. Ruang Lingkup

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas bidang pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju serta lokasi kegiatan. Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana dan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2022, perbandingan antara program, kegiatan dan sub kegiatan atas target dan dana dalam RKPD 2022, capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan/sub kegiatan RKPD serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.

Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) yang dilakukan Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memastikan dan menilai: a. Konsistensi penjabaran RPJMD dan pelaksanaan Renstra-PD. b. Konsistensi indikator, target dan pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran. c. Realisasi kinerja *output* maupun realisasi keuangan setiap kegiatan/sub kegiatan pada RKPD Tahun 2022. d. Capaian kinerja *outcome* dan anggaran RPJMD Tahun 2022.

1.5. Metode Evaluasi

1. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 adalah data primer yang berasal dari isian formulir pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

2. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengelompokan data dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dilakukan per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD. Teknik penilaian kinerja atas indikator kinerja kegiatan pembangunan daerah dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam RKPD, serta membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

3. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 adalah analisis perbandingan, yaitu membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan membandingkan realisasi anggaran dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Analisis perbandingan juga dilakukan untuk menunjukkan keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada APBD tahun 2022 dengan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKPD tahun 2022 dan RPJMD tahun 2021-2026.

Penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	SIMBOL
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
2.	76% ≤ 90%	Tinggi	T
3.	66% ≤ 75%	Sedang	S
4.	51% ≤ 65%	Rendah	R
5.	≤ 50%	Sangat Rendah	SR

Sumber: Permendagri Nomor 86/ 2017

1.6. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metode evaluasi dan sistematika laporan.

Bab II Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahunan Daerah

Bab ini berisi tentang Prioritas dan sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022.

Bab III Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022

Bab ini berisi tentang rincian program dan kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022.

Bab IV Perbandingan antara program dan kegiatan, target dan dana dalam RKPD dan APBD

Bab ini berisi tentang perbandingan antara program dan kegiatan, target dan dana dalam RKPD dan APBD Tahun 2022.

Bab V Capaian target kinerja dan penyerapan dana Program/Kegiatan RKPD

Bab ini berisi tentang pencapaian target kinerja dan penyerapan dana program dan kegiatan RKPD Tahun 2022.

Bab VI Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan

Bab ini berisi tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi RKPD tahun 2022.

Lampiran : Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

BAB II

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2022

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 mengacu pada RPJMD Daerah dengan menekankan target Prioritas Pembangunan yang diarahkan pada pemantapan pencapaian visi kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 "Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya.

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, dan merupakan janji kepala daerah terpilih. mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya. Untuk kepentingan pendanaan pembangunan daerah.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan kemendesakan identifikasi masalah dan korelasinya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, terkecuali hal yang sangat mendesak dan memiliki daya ungkit besar terhadap capaian kinerja pemerintah daerah dan berdampak luas bagi masyarakat yang tetap harus dijaga kesinambungannya (performance maintenance) selain itu pula dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional maupun provinsi hal ini guna tercapainya harmonisasi antar perencanaan pembangunan.

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu strategi, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah.

Bagan alir perumusan awal prioritas pembangunan daerah dan program digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Bagan Alir Proses Perumusan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahunan

Ke empat Tahap pembangunan ini ditujukan untuk mencapai kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur menuju Kabupaten yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya pada tahun . Guna mewujudkan prioritas pembangunan tersebut maka ditetapkan 6 misi yang saling mendukung satu sama lain dalam mewujudkan visi daerah yaitu:

1. **Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh**
 Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam kurun waktu 2021-2026 akan dilaksanakan upaya umum terkait peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara utuh. Upaya umum ini terutama berfokus pada perbaikan kesejahteraan masyarakat, baik dalam makna kesejahteraan ekonomi maupun dalam makna kesejahteraan sosial. Selain itu, dalam misi ini juga terkandung upaya umum untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia,
2. **Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas**
 Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam meningkatkan ketahanan perekonomian daerah secara merata serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Di dalamnya tercakup upaya umum dalam meningkatkan produktivitas sektor-sektor perekonomian unggulan daerah serta hilirisasi atas produk-produk tersebut, dibarengi dengan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha secara merata pada seluruh wilayah.
3. **Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas**
 Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah, terutama dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah. Selain itu, misi ini juga dimaksudkan sebagai upaya dalam menjaga ketahanan lingkungan hidup daerah, khususnya dengan memelihara kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.
4. **Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik**
 Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam periode 2021-2026 akan didorong reformasi birokrasi dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Tercakup didalamnya upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan serta upaya dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public, baik yang merupakan pelayanan dasar berbasis SPM maupun pelayanan public lainnya.
5. **Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat**
 Misi ini mencakup upaya umum dalam menjamin ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat. Dalam misi ini, ketenteraman dan ketertiban ditempatkan sebagai prasyarat bagi berlangsungnya upaya pembangunan. Dalam konteks itu, mewujudkan ketenteraman dan ketertiban diarahkan untuk mewujudkan rasa aman dan damai dalam masyarakat
6. **Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya**
 Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah. Di dalam upaya ini, penerapan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya ditempatkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan.

Rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1. Penjabaran tujuan pada Misi-1 yakni "Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh" adalah: Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran: (a) Meningkatnya Kualitas manusia yang berdaya saing (b) Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (c) Meningkatnya kesetaraan gender
2. Penjabaran tujuan pada Misi-2 yakni "Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas" adalah: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan dengan sasaran: (a) Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah ; (b) Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan lapangan usaha.
3. Penjabaran tujuan pada Misi-3 yakni "Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas" adalah: Meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah yang berkelanjutan" dengan sasaran: (a) Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah; (b) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
4. Penjabaran tujuan pada Misi-4 yakni "Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik" adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, dengan sasaran: (a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan; (b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
5. Penjabaran tujuan dari Misi-5 yakni "Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat" adalah Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman dengan sasaran Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat,
6. Penjabaran tujuan dari Misi-6 yakni "Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya" adalah Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama

serta ketahanan budaya daerah dengan sasaran Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan.

, adapun hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan kabupaten Luwu Timur berdasarkan RPJMD kabupaten Luwu Timur 2016-2021. Sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya			
1	Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T1)	Meningkatnya Kualitas manusia yang berdaya saing (S1)	Mendorong kontribusi dunia usaha, kesadaran kritis kolektif, dan dukungan sarana/prasarana dalam meningkatkan derajat pendidikan dan literasi, lama hidup dan kesehatan, serta daya beli masyarakat. (St1)
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2)	Mengoptimalkan pemanfaatan dana dan koordinasi perangkat daerah dengan pemerintah desa dalam memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi desa dalam kerangka pemenuhan SDGs Desa (St2)
		Meningkatnya Pemberdayaan Gender (S3)	Menguatkan Peran dan Kapasitas Perempuan dalam Pembangunan (St3)
Misi 2 Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas (M2)			
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan (T2)	Meningkatnya realisasi investasi Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)	Memanfaatkan teknologi terkini dan spirit milenial dalam meningkatkan produktivitas komoditas unggulan dengan didukung oleh inovasi daerah dan prasarana/sarana perdagangan (St4)
		ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha	Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan perkembangan start-up UMKM berbasis digital yang didukung oleh iklim investasi dan persaingan usaha yang baik (St5)
Misi 3 Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)			
3	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan (T3)	Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)	Meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan dalam menjaga dan memelihara fungsi infrastruktur pekerjaan umum, perhubungan, pemukiman dan perumahan, serta sumberdaya air secara berkualitas diiringi dengan kepatuhan terhadap RTRW (St6)
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)	Memperkuat sistem pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati berbasis kontribusi multi pemangku kepentingan diiringi dengan peningkatan kapasitas dalam adaptasi dan mitigasi terhadap risiko bencana dan perubahan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
			iklim (St7)
Misi 4			
Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)			
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T4)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)	Memfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan perbaikan tata kelola keuangan daerah diiringi dengan peningkatan profesionalisme SDM aparatur berbasis jabatan fungsional (St8)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)	Meningkatkan akurasi data, kesiapan sarana dan fasilitas, serta kesiapan SDM aparatur diiringi dengan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi serta standar operasional prosedur dalam pemenuhan SPM pelayanan dasar dan perbaikan kualitas pelayanan non SPM (St9)
Misi 5			
Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat (M5)			
5	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman (T5)	Terpeliharanya Rasa Aman dan damai dalam masyarakat	Menguatkan peran kelembagaan masyarakat secara bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban serta rasa aman dan damai dalam masyarakat (St10)
Misi 6			
Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya (M6)			
6	Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah (T6)	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11)	Memperkuat peran forum kerukunan umat beragama serta pembinaan mental-spiritual diiringi dengan penguatan modal keragaman etnik dan suku dalam pemajuan kebudayaan (St11)

Sumber: RPJMD Kab.Luwu Timur 2021-2026

Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

Pada tahun 2022 upaya pembangunan diakselerasikan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Tema pembangunan pada tahun ini adalah "**Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural berbasis nilai agama dan budaya**

". Kebijakan pembangunan diprioritaskan pada:

- Pengembangan Ekonomi kerakyatan dan pengembangan pariwisata;
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- Pengembangan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Berdasarkan prioritas pembangunan diatas maka, Sasaran Pembangunan dan arah kebijakan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran	Arah Kebijakan 2022
1.	Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing (S1)	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki sistem belajar-mengajar dan manajemen berbasis sekolah • Pemenuhan sarana-parasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan • Pengembangan sistem ketersediaan barang pokok dan penting
2.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa • Penguatan ketahanan ekonomi desa • Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa
3	Meningkatnya Kesetaraan Gender (S3)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah
4.	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem penyuluhan pertanian berbasis teknologi digital level BPP, posluhdes, poktan/gapoktan • Pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat • Pengembangan kapasitas SDM, manajemen, dan permodalan koperasi dan UMKM
5.	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan lapangan usaha (S5)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pencari kerja
6.	Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan/jembatan serta perlengkapan sarana/prasarananya
7.	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan Bencana (S7)	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan dan implementasi rencana pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara mutipihak

No.	Sasaran	Arah Kebijakan 2022
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kompetensi SDM aparatur berbasis jabatan fungsional dan optimalisasi organisasi
9.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)	<ul style="list-style-type: none"> • Penajaman akurasi data penerima layanan SPM • Penguatan sistem pelayanan public di Kecamatan
10.	Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat (S10)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat untuk ketenteraman, ketertiban dan keamanan secara swakarsa • Penegakan Perda, Perkada dan produk hukum daerah lainnya
11.	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan bina mental-spiritual • Pengembangan obyek-obyek pemajuan budaya • Pengembangan Islamic Center

Tabel 2.2
Kebijakan Umum dan Prioritas Program Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Berdasarkan RPJMD 2021-2022

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Kinerja tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
1	2	3	4	5	6	8	13	
	Visi: Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya							
1	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)	Tujuan-1:						
		Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T1)	1	Angka Kemiskinan	%	6,85	6,64	
		Sasaran-1:						
		Meningkatnya Kualitas manusia yang berdaya saing (S1)	2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	73,22	73,80	
		Sasaran-2:						
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2)	3	Indeks Desa Membangun (IDM)	Status Desa	Berkembang	Maju	
Sasaran-3:								
		Meningkatnya Pemberdayaan Gender (S3)	4	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Nilai	89,71	89,94	
2	Mengembangkan	Tujuan-2:						

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Kinerja tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas (M2)	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan (T2)	5 Pertumbuhan Ekonomi	%	1,46	2,49-3,33	
			6 Rasio Gini	Nilai	0,405	0.389	
		Sasaran-4					
		Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)	7 Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	-0.25	1.83	
		Sasaran-5:					
	ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha (S5)	8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,46	3.30		
3	Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)	Tujuan-3:					
		Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan (T3)	9 Indeks daya saing infrastruktur daerah	nilai	1,4830 (Sedang)	1,8150 (Sedang)	
		Sasaran-6:					
		Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)	10 Indeks kepuasan layanan infrastruktur	Nilai	74,42	74,89	
		Sasaran-7:					
	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)	11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	Point	86,87	87,55		
		12 Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	202 (TINGGI)	202 (TINGGI)		
4	Menciptakan pemerintahan dan	Tujuan-4:					
		Mewujudkan tata kelola pemerintahan	13 Indeks Reformasi	Predikat	C	CC	

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Kinerja tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
	pelayanan publik yang lebih baik (M4)	yang baik, bersih dan melayani (T4)	Birokrasi (IRB)					
		Sasaran-8:						
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)	14	Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)	Predikat	C (Sangat Perlu Perbaikan)	A (Baik)	
			15	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	B	BB	
		Sasaran-9:						
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)	16	IKM Pelayanan SPM (Nilai)	Nilai	80,35	82,42	
17	IKM Pelayanan Perijinan dan non Perijinan (Nilai)		Nilai	78,73	82,21			
5	Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat (M5)	Tujuan-5:						
		Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman (T5)	18	Angka Kriminalitas	Point	0,000738	0,000643	
		Sasaran-10:						
	Terpeliharanya Rasa Aman dan damai dalam masyarakat	19	Indeks Ketertiban dan Ketenteraman	Nilai	76,53	76,72		
		Tujuan-6:						
6	Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya (M6)	Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah (T6)	20	Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	75,67	75,89	
		21	Indeks Pembangunan	Nilai	49,82	54,27		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Kinerja tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Kebudayaan				
		Sasaran-11:					
		Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11)	22 Cakupan penerapan nilai Agama dalam masyarakat	%	95	95	
			23 Cakupan penerapan nilai budaya dalam masyarakat	%	95	95	

Sumber : RPJMD Kab. Luwu Timur 2021-2026

BAB III PROGRAM RKPD TAHUN 2022

Program Prioritas yaitu program yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan SPM. Program Prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi :

Prioritas I : dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. serta ditujukan untuk urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintah daerah.

Prioritas II : dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam hal pemenuhan pokok visi dan misi kepala daerah termasuk dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar, maka dikelompokkan dalam prioritas I.

Prioritas III : dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, khususnya yang terkait dengan urusan penunjang urusan Pemerintahan.

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan Perangkat Daerah (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target Sasaran Pembangunan Daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi Prioritas Pembangunan Daerah, disesuaikan dengan keterbatasan anggaran dan kemendesakan identifikasi masalah dan korelasinya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD. Suatu prioritas pembangunan di masa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, terkecuali hal yang sangat mendesak dan memiliki daya ungkit besar terhadap capaian kinerja Pemerintah Daerah dan berdampak luas bagi masyarakat yang tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*) selain itu pula dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional maupun Provinsi hal ini guna tercapainya harmonisasi antar perencanaan pembangunan

Adapun Indikasi Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Program Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Target capaian RPJMD Tahun 2022

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-2021	Tahun-2022	
1	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)				
1 1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat (T1)	PDRB/kapita (Rp (juta))	78,58	71.45	
1 1 1	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat (S1)	Angka kemiskinan (Persen)	6,94	6.64	
1 1 1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah ketersediaan pangan utama setara pangan pokok ((Ton))	246,1	205,774	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
1 1 1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah lokasi gerakan diversifikasi pangan (lokasi)	6	6	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
1 1 1	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah lokasi yang rawan dan rentan pangan yang intervensi (lokasi)	0	3	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
1 1 1	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persen)	0	100	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
1 1 1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Pengembangan Objek Pariwisata (Persen)	100	100	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 1 1	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Wisatawan (Persen)	123	95	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 1 1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pembinaan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Persen)	58	95	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 1 1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	9	12	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1 1 1	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang bertanda tera sah (%)	112,22	90	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	5.57	6.08	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Usaha Industri yang terdata dalam SIINAS (%)	100	100	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penetapan Kawasan Transmigrasi (%)	100	100	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun (Ha)	230	120	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (%)	95	95	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1	1	2	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia (S2)	Indeks Pembangunan Manusia (Persen)	73,24	73.8	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	49,02	46.91	DINAS PENDIDIKAN
				Angka Partisipasi Masyarakat putus/belum sekolah pada Lembaga Pendidikan non formal (%)	54,56	54.58	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	99,81	103.33	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	97,37	103.58	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk (%)	0,02	0.02	DINAS KESEHATAN
				Angka kematian ibu (per 100000 KH)	126,17	108.14	
				Angka kematian Bayi (per 1000 KH)	8,11	7.93	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (%) (%)	80	81.66	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan dan persyaratan perizinan (%)	50	70	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan UKBM (Desa)	127	127	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan (%)	24	36	RSUD I LAGALIGO

]]]	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tingkat pemenuhan Pengembangan SDM (%)	0	100	RSUD I LAGALIGO
]]]	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang diberikan bantuan sosial (%)	122	40.23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
]]]	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Prosentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani (%) (%)	100	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
]]]	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PMKS yang tertangani (%)	48,14	44.93	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
]]]	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (%)	97,49	22.41	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
]]]	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase korban bencana yang ditangani (%)	100	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
]]]	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit) (%)	100	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
]]]	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase OPD yang memenuhi indikator 7 prasyarat PUG (%)	124	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
]]]	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu (%)	100	81.82	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
]]]	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Ratio layanan pembelajaran keluarga (%)	0,07	0.14	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
]]]	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota (%)	100	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

]]]	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase indikator KLA yang terpenuhi (%)	100	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
]]]	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase anak korban kekerasan termasuk TPPO (%)	0	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
]]]	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa yang melibatkan masyarakatnya dalam membangun desa (%)	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
]]]	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan (OPD) (Nilai)	4	4	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
]]]	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR) (persen)	65	66	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
]]]	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Nilai)	35.02	35.52	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
]]]	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan (Persen)	100	100	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
]]]	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pemenuhan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaaag (Persn)	100	100	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
]]]	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase gugus depan yang aktif (persen)	95	95	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
]]]	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pemustaka (%)	67,35	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
]]]	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (%) (Persentase)	95	95	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2	1	Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas(M2)				
2	2	Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah secara merata (T2)	Rasio Gini (Persen)	0.38	0.28	
2	3	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah (S3)	Laju Pertumbuhan ekonomi (Persen)	6,42	2.50	
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang terbit izin usaha simpan pinjam koperasi (%)	0	2.5	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	29,41	41.25	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi (%)	31,88	53.25	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan (%)	10	21.2	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi (%)	0	2.15	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)	37,38	3.8	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan skala usaha mikro (%)	3,68	1.83	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Nelayan Tangkap (Ton)	8.954,01	101,659.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	310.233	315,565.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku (Persen)	100	94	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi hasil pengolahan perikanan (Ton)	312	322	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA	presentase dan sarana pertanian yang	100	100	DINAS PERTANIAN

PERTANIAN			dibangun (%)				
1	1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Layanan Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian (%)	100	100	DINAS PERTANIAN	
1	1	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	presentase pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner (%)	100	100	DINAS PERTANIAN	
1	1	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	presentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (%)	100	100	DINAS PERTANIAN	
1	1	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				DINAS PERTANIAN	
1	1	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	presentase penyuluhan yang meningkat kapasitasnya (%)	84	100	DINAS PERTANIAN	
1	1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar rakyat yang dimanfaatkan (%)	94,6	90	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
1	1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah ekspor perdagangan (Ton)	76,000.00	78,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
1	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan Pemukiman Transmigran yang dikembangkan (Kawasan)	1	1	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
2	2	4	Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha (S4)	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	4,96	3.3	
1	1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (Orang)	154.100	158,900.00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
1	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	73,89	75.75	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
1	1	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) (%)	73,14	70.98	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
1	1	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)	17,01	22.82	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
1	1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional (Angka)	41	40	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
1	1	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase rencana Investasi Penanaman Modal (%)	117,37	20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

1	1	1	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (%)	75	80	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	1	1	Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)				
3	3	1	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah (T3)	Indeks daya saing infrastruktur daerah (indeks)	0	0	
3	3	5	Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S5)	indeks kepuasan layanan infrastruktur (Predikat)	Memuaskan	Memuaskan	
1	1	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio jaringan irigasi (%)	8,32	8.41	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	1	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (%)	59.50	62.59	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	1	1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	1	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	0	2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	1	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	1	1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	1	1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	1	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten kondisi baik (%)	39,8	42.04	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	1	1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	31.37	41.89	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	1	1		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja (%)	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

7	7	7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase rata rata penyelenggaraan penataan ruang (%)	39,8	78	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	7	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah warga negara korban bencana atau terkena relokasi yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7	7	7		Persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang (%)	100	100	
7	7	7	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (%)	24.94	43.88	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7	7	7		Rasio rumah layak huni ()	18.04	18.34	
7	7	7	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH diluar kawasan permukiman kumuh yang ditangani (%)	2.81	2.89	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7	7	7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU (%)	21.05	42.1	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7	7	7	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengamanan tanah Kosong aset Pemda (%)	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7	7	7	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Angkutan Yang Layak (%)	0.72	0.73	DINAS PERHUBUNGAN
7	7	7		Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Yang disediakan (%)	41.8	64.88	
7	7	7	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Kecelakaan Kapal angkutan di Danau dan sungai (%)	1.35	1.35	DINAS PERHUBUNGAN
7	7	7		Persentase Kecelakaan Kapal angkutan di laut (%)	0	0.07	
4	7	7	Menjaga ketahanan lingkungan hidup (T4)	Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Persen)	0	0	
4	4	6	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S6)	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (Persen)	84,085	87.55	
7	7	7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	7	7	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara (%)	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

7	7	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase luas lahan yang dibebaskan (%)	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7	7	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin lokasi (%)	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7	7	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	39.85	40.15	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7	7	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan (Persen)	0	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	7	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perbaikan kualitas air, udara dan tutupan lahan (Persen)	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang tertangani dengan baik (Persen)	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	7	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penghasil limbah B3 yang di awasi (Persen)	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan (Persen)	50	50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional (Jumlah MHA)	3	3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat yang dibina (Persen)	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan yang diterima (Persen)	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	7	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase masalah lingkungan yang di selesaikan (Persen)	50	50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani (Persen)	80	70	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	7	Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik(M4)				

4	3	1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T5)	Indeks reformasi birokrasi (IRB) (Persen)	46,94	0	
4	3	7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S7)	Nilai SAKIP Daerah (Peredikat)	WTP	WTP	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	95	95.3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	92	94	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	95	95	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100	0	DINAS PERHUBUNGAN
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	95	95	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	INSPEKTORAT
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	RSUD I LAGALIGO
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	SEKRETARIAT DPRD
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	ANGKONA
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	BURAU
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	KALAENA
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	MALILI

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	MANGKUTANA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	NUHA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	TOMONI
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	TOMONI TIMUR
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	WASUPONDA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	WOTU
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	TOWUTI
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	persentase pelaksanaan kegiatan kebijakan perekonomian (%)	50	55	SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rancangan perda Yang Difasilitasi (%)	80	83	SEKRETARIAT DPRD
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah (Persen)	96.5	96.7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD tertata dengan baik (Perangkat Daerah)	100	90	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah (%)	97.2	97.5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Aparatur (%) (Persentase)	115,75	90	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				INSPEKTORAT
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				INSPEKTORAT
4	5	8	Meningkatnya kualitas pelayanan public (S8)	IKM Pelayanan SPM (Persen)	0	0	
				IKM Pelayanan perizinan dan non perizinan (Persen)	85,37	82.21	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan Dokumen Kependudukan (persentase)	98,87	99.22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil (persentase)	96,99	86.31	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (%)	65	75	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	100	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Yang baik penataan desanya (%)	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib administrasi (%)	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola (persen (%))	100	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	persentase pengelolaan aplikasi dan informatika pemerintahan daerah (persen (%))	100	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Kinerja program Pelayanan Penanaman Modal (%)	100	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Database Penanaman Modal yang Valid (Angka)	2	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

]]]	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah (persen (%))	100	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
]]]	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan (persen (%))	100	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
]]]	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah dan Desa yang menerapkan Tata Kelola Kearsipan sesuai dengan Peraturan yang berlaku (%)	100	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
]]]	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip perangkat daerah yang terlindungi dan terselamatkan (%)	100	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
]]]	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Presentase perijinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup (%)	0	25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
]]]	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Besaran Rekomendasi Izin Usaha Industri yang dihasilkan (%)	10	10	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
]]]	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Cakupan Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan (%)	80	80	SEKRETARIAT DAERAH
]]]	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
]]]	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
]]]	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
]]]	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik (%)	100	100	ANGKONA
]]]	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran serta Masyarakat dalam Koordinasi,Fasilitasi,Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	100	ANGKONA

]]]	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	ANGKONA
]]]	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	ANGKONA
]]]	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	BURAU
]]]	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	100	BURAU
]]]	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	BURAU
]]]	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	BURAU
]]]	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik (%)	100	100	MALILI
]]]	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran serta Masyarakat dalam Koordinasi,Fasilitasi,Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	100	MALILI
]]]	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	MALILI
]]]	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	MALILI
]]]	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	MANGKUTANA
]]]	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan	100	100	MANGKUTANA

			Daerah (%)				
]]]	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	MANGKUTANA
]]]	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	MANGKUTANA
]]]	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	NUHA
]]]	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitas, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	100	NUHA
]]]	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	NUHA
]]]	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	NUHA
]]]	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik (%)	100	100	TOMONI
]]]	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitas, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	100	TOMONI
]]]	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	TOMONI
]]]	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	TOMONI TIMUR
]]]	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitas, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan	100	100	TOMONI TIMUR

		Daerah (%)				
]]	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	TOMONI TIMUR
]]	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	TOMONI TIMUR
]]	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik (%)	100	100	WASUPONDA
]]	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	100	WASUPONDA
]]	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	WASUPONDA
]]	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	WASUPONDA
]]	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik (%)	100	100	WOTU
]]	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	100	WOTU
]]	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	WOTU
]]	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	WOTU
]]	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	TOWUTI

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	100	TOWUTI
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	TOWUTI
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	TOWUTI
3			Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat (M5)				
3	6		Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman (T6)	Angka kriminalitas (Persen)	0	0	
3	6	9	Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat (S9)	Nilai Kepuasan Masyarakat atas Kondisi Keamanan dan Ketertiban (Persen)	0	0	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan dasar penanggulangan bencana (%)	33.54	33.57	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada tahun berjalan (kasus)	50	45	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah kegiatan yang terlaksana pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Kegiatan)	120	120	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	0	100	ANGKONA
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	100	100	BURAU
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	100	100	MALILI
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	0	100	MANGKUTANA
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	100	100	NUHA

7	7	7	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	100	100	TOMONI TIMUR
7	7	7	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	100	100	WASUPONDA
7	7	7	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	100	100	WOTU
7	7	7	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	0	100	TOWUTI
7	7	7	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah kebijakan penguatan ideology pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan (%)	95	95	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	7	7	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik (%)	95	95	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	7	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi (%)	95	95	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	7	7	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatankualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial (%)	95	95	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	7	7	Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya (M6)				
6	7	7	Mengembangkan, mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai agama dan budaya (T7)	Cakupan penerapan nilai agama dan budaya dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari (Persen)	0	0	
6	7	10	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S10)	Indeks kerukunan umat beragama (Persen)		75,50	
				Indeks pembangunan kebudayaan (Persen)	0	0	
7	7	7	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Seni dan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan (Persen)	80	85	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Seni dan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan (Persen)	100	100	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase benda, Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan (Persen)	45.33	43.75	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sumber : RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

BAB IV PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM DAN ANGGARAN DALAM RKPD DENGAN APBD TAHUN 2022

4.1. Konsistensi Program dan Anggaran Antara RKPD dengan APBD Tahun 2022

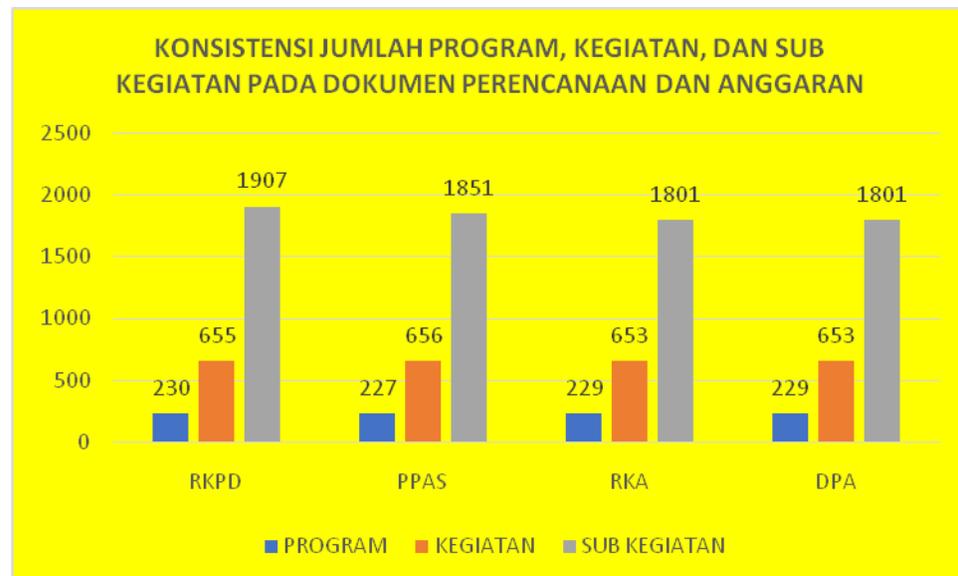
Jumlah Program dalam RKPD sebanyak **230 Program** yang terdiri dari **655 Kegiatan** dan **1907 Sub Kegiatan**, sementara jumlah Program dalam APBD 2022 sebanyak **229 Program** yang terdiri dari **651 Kegiatan** dan **1815 Sub Kegiatan**. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan penggunaan program sebesar 3 (**tiga**) program (0.43%), kegiatan sebesar 2 (**dua**) kegiatan (0.30%) dan **Sub Kegiatan** sebesar **129 Sub Kegiatan** (10,7%) dari dokumen RKPD ke APBD Tahun Anggaran 2022. Nilai penurunan ini merupakan dampak *refocusing* program, kegiatan dan sub kegiatan pada seluruh OPD

URAIAN	RKPD	PPAS	RKA	DPA
PROGRAM	232	227	229	229
KEGIATAN	658	656	653	651
SUB KEGIATAN	1944	1851	1801	1815

Berikut disajikan konsistensi jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada grafik berikut:

Diagram 4.1

Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022

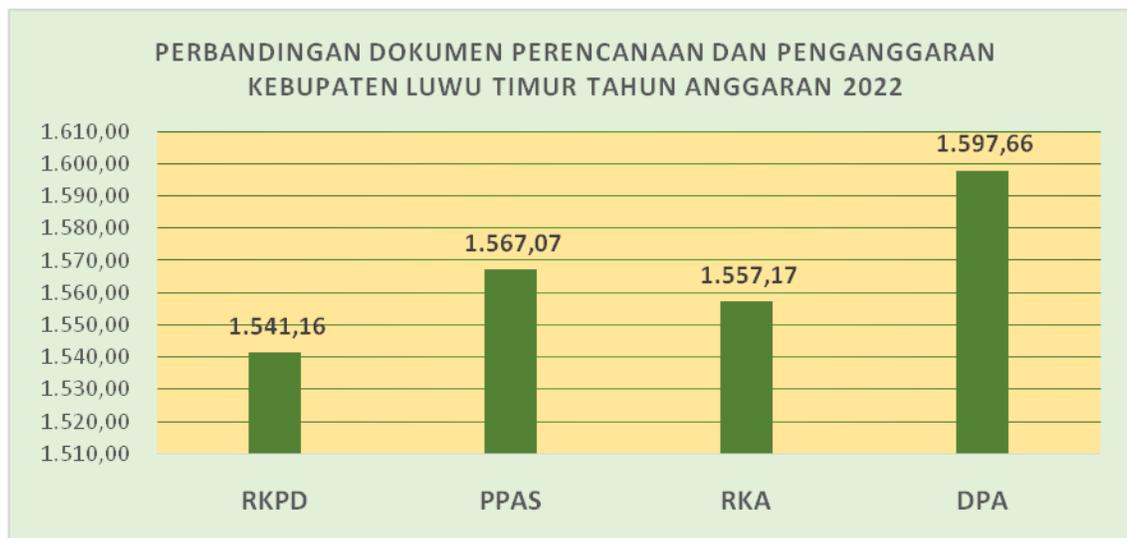


4.2. Konsistensi Anggaran Antara RKPD dengan APBD Tahun 2022

Jumlah anggaran yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2022 sebesar Rp1,541,158,665,692,- sedangkan jumlah anggaran dalam APBD Tahun 2022 sebesar Rp1,597,659,847,888,-. Dengan demikian, ada selisih antara jumlah anggaran yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2022 dengan jumlah anggaran yang diakomodir ke dalam APBD Tahun 2022, yakni bertambah sebesar Rp56,501,182,196,-. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan belanja sebesar 8,23% pada APBD dari total anggaran yang direncanakan pada RKPD. Salah satu penyebab penambahan ini terjadi, yakni naiknya target pendapatan yang semulanya 1.461.382.753.570,00 menjadi Rp1,551,157,980,944,- atau naik sebesar Rp89,775,227,374 atau 6.14%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa belum ada keselarasan anggaran APBD Tahun 2022 dengan RKPD Tahun 2022.

Berikut disajikan konsistensi anggaran dalam proses perencanaan dan penganggaran tahun 2022 seperti pada grafik berikut ini:

Diagram 4.2
Jumlah Anggaran Pada Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022



Sumber: Dokumen Perencanaan dan Penganggaran TA 2022, setelah diolah 2022

BAB V
CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN RKPD

Pengukuran capaian target kinerja dan penyerapan dana Program/kegiatan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut maka digunakan beberapa kriteria penilaian seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Kriteria Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2022 Triwulan II

No	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Interval nilai Realisasi Kinerja 1 Tahun
1	Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %
2	Tinggi	T	76 % ≤ 90%
3	Sedang	S	66 % ≤ 75 %
4	Rendah	R	51 % ≤ 65 %
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %

Dari hasil pengukuran tingkat capaian rata-rata realisasi kinerja dan keuangan kegiatan pada pelaksanaan RKPD Tahun 2022 Triwulan I, maka untuk tingkat capaian kinerja RKPD diperoleh nilai 36,91%, sedangkan untuk realisasi anggaran nilainya mencapai 58,45 %. Apabila menggunakan kategori interval 1 tahun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, hasil kinerja pelaksanaan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Triwulan II termasuk dalam kategori **"Sangat Rendah"**, dan hasil realisasi anggaran juga termasuk pada kategori **"Rendah"**. Pencapaian realisasi anggaran dan pencapaian kinerja ini tetap meninggalkan catatan untuk menjadi perbaikan kedepan. Sekaitan dengan belum optimalnya pencapaian target dan realisasi belanja sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan agar menjadi pertimbangan saat Evaluasi Triwulan Berikutnya.

Pencapaian kinerja dan realisasi anggaran masing-masing OPD terlihat pada tabel 5.2 berikut:

Tabel. 5.2
Capaian Anggaran Dan Kinerja Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Triwulan II

No	Nama SKPD	ANGGARAN BELANJA		REALISASI BELANJA		KATEGORI	SISA ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
		Total Belanja	Target Belanja TW I	REALISASI BELANJA TW I	%		Rp	%	%	
1	2	3	4		5					
1	Sekretariat DPRD	33.001.493.900	26.312.015.014,00	14.390.614.280,00	54,69	SR	18.610.879.620	43,61	43,61	SR
2	Dinas Pendidikan	295.062.101.500,00	202.904.426.512,00	109.134.079.791,00	53,79	SR	185.928.021.709	36,99	36,99	SR
3	Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja	5.980.934.190,00	4.063.906.759,00	2.215.958.572,00	54,53	R	3.764.975.618	37,05	37,05	SR
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	5.188.596.016,00	3.513.809.652,00	1.585.377.336,00	45,12	SR	3.603.218.680	30,56	30,56	SR
5	Sekretariat Daerah	61.970.997.414,00	37.812.635.220,00	23.917.629.301,00	63,25	SR	38.053.368.113	38,59	38,59	SR
6	RSUD I LAGALIGO	134.617.989.439	81.484.022.826,00	56.516.572.704,00	69,36	S	78.101.416.735	41,98	41,98	SR
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan	14.243.389.593,00	6.592.157.006,00	2.889.291.116,00	43,83	SR	11.354.098.477	20,29	20,29	SR
8	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	5.871.351.727	3.852.342.843	1.935.257.748	50,24	SR	3.936.093.979	32,96	32,96	SR
9	Kec. Tomoni Timur	2.565.823.250	2.045.592.148	1.270.005.558	62,08	R	1.295.817.692	49,50	49,50	SR

10	Kec. Mangkutana	3.013.872.800	2.082.547.563	1.434.088.468	68,86	SR	1.579.784.332	47,58	47,58	SR
11	Kec. Wasuponda	2.818.221.400	1.199.740.122	1.838.403.708	153,23	SR	979.817.692	65,23	65,23	SR
12	Kec. Angkona	2.859.763.900,00	2.102.207.715,00	1.371.883.923,00	65,26	SR	1.487.879.977	47,97	47,97	SR
13	Kec. Tomoni	4.366.590.550,00	3.242.515.102,00	2.108.930.406,00	65,04	R	2.257.660.144	48,30	48,30	SR
14	Kec. Towuti	3.947.968.600,00	2.193.823.832,00	1.375.023.088,00	62,68	R	2.572.945.512	34,83	34,83	SR
15	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	349.524.028.440	99.597.461.758	83.270.543.970	83,61	T	266.253.484.470	23,82	23,82	SR
16	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.769.180.131,00	3.490.921.676,00	1.925.907.938,00	55,17	R	2.843.272.193	40,38	40,38	SR
17	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM & Perindustrian	7.564.418.264	5.358.222.362	2.893.073.987	53,99	R	4.671.344.277	38,25	38,25	SR
18	Badan Pendapatan Daerah	12.267.803.116	6.892.531.094	5.052.565.403	73,30	S	7.215.237.713	41,19	41,19	SR
19	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	46.442.531.339	32.153.856.517	12.558.974.048	39,06	SR	33.883.557.291	27,04	27,04	SR
20	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	187.659.318.403	132.220.477.727	27.414.421.956	20,73	SR	160.244.896.447	14,61	14,61	SR
21	Dinas Perikanan	15.072.942.397,00	6.784.591.029	2.075.338.828	30,59	SR	12.997.603.569	13,77	13,77	SR
22	Dinas Lingkungan Hidup	7.872.315.838	4.430.899.365	2.879.540.507	64,99	R	4.992.775.331	36,58	36,58	SR
23	Dinas Perhubungan	14.146.760.400	7.363.409.415	2.771.587.406	37,64	SR	11.375.172.994	19,59	19,59	SR
24	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian	8.145.894.744	5.251.263.275	2.574.958.622	49,04	SR	5.570.936.122	31,61	31,61	SR
25	Dinas Pariwisata, Kepemudaan & Olahraga	27.882.781.924	25.055.404.361	2.110.678.551	8,42	SR	25.772.103.373	7,57	7,57	SR

26	Badan Penanggulangan Bencana	4.594.450.041,00	2.777.734.100,00	1.487.493.936,00	53,55	R	3.106.956.105	32,38	32,38	SR
27	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	4.159.467.840	2.859.503.701	1.917.467.091	67,06	S	2.242.000.749	46,10	46,10	SR
28	Dinas Pengendalian Penduduk & KB	10.177.992.431	5.328.899.332	2.423.826.453	45,48	R	7.754.165.978	23,81	23,81	SR
29	Satuan Polisi Pamong Praja	12.194.299.907	7.621.184.275	4.536.093.819	59,52	SR	7.658.206.088	37,20	37,20	SR
30	Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan	7.473.718.450	4.789.763.200	3.195.025.735	66,71	SR	4.278.692.715	42,75	42,75	SR
31	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	9.796.080.192,00	6.697.144.660,00	4.866.040.065,00	72,66	S	4.930.040.127	49,67	49,67	SR
32	Bapelitbangda	8.988.679.600	5.520.395.288	2.904.263.885	52,61	SR	6.084.415.715	32,31	32,31	SR
33	Inspektorat	12.035.567.579	8.154.082.968	4.937.595.965	60,55	SR	7.097.971.614	41,03	41,03	SR
34	BKPSDM	10.701.258.050	7.113.116.247	3.416.055.726	48,02	SR	7.285.202.324	31,92	31,92	SR
35	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	4.120.208.839,00	3.052.945.621,00	1.370.767.486,00	44,90	SR	2.749.441.353	33,27	33,27	SR
36	Dinas Kesehatan	239.760.627.291	146.049.693.974	82.403.655.241	56,42	R	157.356.972.050	34,37	34,37	SR
37	Kecamatan Burau	3.315.965.850,00	2.260.749.020,00	1.591.502.378	70,40	S	1.724.463.472	48,00	48,00	
38	Kecamatan Wotu	3.146.372.275	2.193.823.832	1.375.023.088	62,68	S	1.771.349.187	43,70	43,70	SR
39	Kecamatan Kalaena	2.523.235.700,00	1.832.282.133,00	1.387.348.596,00	75,72	SR	1.135.887.104	54,98	54,98	SR
40	Kecamatan Malili	3.858.936.598	2.458.418.509	1.779.021.375	72,36	R	2.079.915.223	46,10	46,10	SR
41	Kecamatan Nuha	3.955.917.970	3.056.168.204	1.813.348.589	59,33	SR	2.142.569.381	45,84	45,84	SR

	TOTAL	1.597.659.847.888	919.766.685.957	488.915.236.643	58,45	SR			36,91	SR
--	--------------	--------------------------	------------------------	------------------------	-------	----	--	--	-------	----

Sumber : Data Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II setelah diolah Tahun 2022

Sumber : Data Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II setelah diolah Tahun 2022

BAB VI
KENDALA YANG DIHADAPI DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Kendala utama atau permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam pencapaian kinerja dan realisasi keuangan pada Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 Triwulan II adalah sebagai berikut:

CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
<p>1. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 36,99%.</p> <p>Tingkat capaian kinerja sangat rendah dipengaruhi oleh:</p> <p>1. Kinerja kegiatan Pengadaan barang dan jasa. Dari 84 kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 21719522000,- ,sampai triwulan II tahun 2022 hanya 2 kegiatan dalam status kontrak. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan pengadaan berdampak pada progress daya serap anggaran dan mempengaruhi tahapan kegiatan dan program dalam proses mencapai kinerja.</p>	<p>1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Rendah (R) dengan prosentase sebesar 53,79% dengan capaian realisasi sebesar Rp.109.134.079.791,- dari target realisasi sebesar Rp. 202.904.426.512,-.</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <p>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 54.001.431.898,- pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan sebesar Rp. 53.279.853.427,-</p> <p>2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN sebesar Rp. 39.692.849.323,-</p> <p>3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp. 2.889.771.600,-</p>
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
DINAS KESEHATAN	
<p>2. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 38,45%.</p> <p>Tingkat capaian kinerja sangat rendah dipengaruhi oleh:</p>	<p>1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Rendah (R) dengan prosentase sebesar 53,79% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 74.081.712.852,- dari target realisasi sebesar Rp. 137.727.751.585,-.</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <p>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 14.995.078.089,- pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan sebesar Rp. 14.040.150.615,-</p>

CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
	<p>2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN sebesar Rp. 1.297.929.850,-</p> <p>3. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT sebesar Rp. 47.052.781.634,-</p>
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
RUMAH SAKIT I LAGALIGO	
<p>4. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 41,98%.</p> <p>Tingkat capaian kinerja sangat rendah dipengaruhi oleh:</p> <p>1. Kinerja kegiatan Pengadaan barang dan jasa bersumber dari APBD. Dari 21 kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 26.050.000.000,- ,sampai triwulan II tahun 2022 hanya 10 kegiatan dalam status kontrak. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan pengadaan berdampak pada progress daya serap anggaran dan mempengaruhi tahapan kegiatan dan program dalam proses mencapai kinerja.</p>	<p>1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan prosentase sebesar 69,36% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 56.516.572.704,- dari target realisasi sebesar Rp. 81.484.022.826,-</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <p>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 23.405.878.529,- pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan sebesar Rp. 4.378.605.332,- , kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 1.631.441.750,- ,kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD sebesar Rp. 17.373.686.447,-</p>
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	
<p>1. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 14,61%.</p>	<p>1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan prosentase sebesar 20,73% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 27.414.421.955,95 dari target realisasi sebesar Rp. 132.220.477.727,-</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <p>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 3.887.565.791,- pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan sebesar Rp. 3.096.752.691,-</p>

CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
	<p>2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) sebesar Rp. 15.166.920.027,33,-</p> <p>3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM sebesar Rp. 10.445.518.349,64</p> <p>4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH sebesar Rp. 14.746.379.000,-</p> <p>5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE sebesar Rp. 5.554.903.000,-</p> <p>6. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN sebesar Rp. 2.195.943.719,-</p> <p>7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG sebesar Rp. 24.333.159.598,2,-</p> <p>8. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA sebesar Rp. 306.913.000,-</p> <p>9. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN sebesar Rp. 26.038.675.527,88,-</p> <p>10. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI sebesar Rp. 220.867.055,-</p> <p>11. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG sebesar Rp. 395.118.203,-</p>
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN	
12. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 20,29%.	<p>1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan prosentase sebesar 2,85% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.889.291.116,- dari target realisasi sebesar Rp. 6.592.157.006,-.</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <p>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 1.189.966.696,- pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan sebesar Rp. 1.070.326.098,-</p> <p>2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN sebesar Rp. 236.704.400,-</p>

CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
	3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN sebesar Rp. 547.615.300,- 4. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN sebesar Rp. 576.725.520,- 5. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH sebesar Rp. 266.875.000,-
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
KANTOR KESATUAN BANGSA & POLITIK	
6. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 33,27%.	1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan prosentase sebesar 44,90% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.370.767.486,- dari target realisasi sebesar Rp. 3.052.945.621,- Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada : <ol style="list-style-type: none"> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 941.348.773,- pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan sebesar Rp. 912.809.151,- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik sebesar Rp. 696.625.475,- pada sub kegiatan Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik sebesar Rp. 684.198.925,-
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
7. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 37,02%.	1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sedang (S) dengan prosentase sebesar 35,93% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 4536093819,- dari target realisasi sebesar Rp. 7621184275,-

CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
	<p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 2.141.180.437,- pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan sebesar Rp. 1.607.987.460,- PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM sebesar Rp. 943.910.019,- pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kotasebesar Rp. 823.574.150,-
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
Dinas Sosial, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
8. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 49,67%.	<p>1. Tingkat capaian realisasi anggaran Sedang (S) dengan prosentase sebesar 72,66% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 4866040065,- dari target realisasi sebesar Rp. 6697144660,-</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 1.084.321.110,- pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan penyediaan gaji sebesar Rp. 889.454.567,-
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
9. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 32,38%.	<p>1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Rendah (R) dengan prosentase sebesar 53,55% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1487493936 dari target realisasi sebesar Rp. 2777734100,-</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p>

CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 1.487.493.936,- pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan penyediaan gaji sebesar Rp. 813.270.615,- 2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA sebesar Rp. 390.287.006,- pada kegiatan Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp. 306.435.977,-
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
3. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 37,05%.	1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan prosentase sebesar 54,53% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.215.958.572,- dari target realisasi sebesar Rp. 4.063.906.759,- Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada : 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 1.325.376.174,- pada kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kurang sebesar Rp. 1.268.447.828,- 2. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA sebesar Rp. 220.352.648,- 3. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA sebesar Rp. 115.889.894,- 4. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL sebesar Rp. 144.922.835,-
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
Dinas Perikanan	
4. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 13,77%.	1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan prosentase sebesar 30,59 % dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.075.338.828,- dari target

CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
	<p>realisasi sebesar Rp. 6.784.591.029,-</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 1.073.249.981,- pada kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kurang sebesar Rp. 964.184.631,- 2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP sebesar Rp. 1.142.415.357,- 3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA sebesar Rp. 2.080.648.900,-
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
Dinas Lingkungan Hidup	
<p>5. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 36,58%.</p>	<p>1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Rendah (R) dengan prosentase sebesar 43,04% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.879.540.507,- dari target realisasi sebesar Rp. 4.430.899.365,-</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 554.019.917,- pada kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kurang sebesar Rp. 452.345.701,- 2. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP sebesar Rp. 73.914.425,- 3. PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA sebesar Rp. 356.098.093,- 4. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN sebesar Rp. 481.947.160,-

CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
6. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 32,96%.	<p>1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan prosentase sebesar 50,24 % dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1935257748 dari target realisasi sebesar Rp.</p> <p>3852342843,-</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 1.917.085.095,- pada kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kurang sebesar Rp. 858.851.147,- dan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor sebesar Rp. 699.000.000,-
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
7. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 30,56 %.	<p>1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan prosentase sebesar 45,12% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1585377336 dari target realisasi sebesar Rp.</p> <p>3513809652</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 1928432316 pada kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan

CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
	<p>tunjangan kurang sebesar Rp. 1054690432,-</p> <p>2. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA sebesar Rp. 503510071</p> <p>3. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT sebesar Rp. 223292273</p>
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
8. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 23,81%	<p>1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan prosentase sebesar 45,48% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.423.826.453,- dari target realisasi sebesar 5.328.899.332,-</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <p>1. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA sebesar Rp. 926.373.930,-</p> <p>2. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) sebesar Rp. 1.326.416.147,-</p>
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
Dinas Perhubungan	
3. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 19,59%	<p>1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan prosentase sebesar 37,64% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2771587406,- dari target realisasi sebesar Rp. 7363409415,-</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <p>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 1.795.750.402,- pada kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kurang sebesar Rp. 922.475.615,- kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</p>

CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
	Daerah sebesar Rp. 776.231.900,-
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
Dinas Komunikasi dan Informatika	
4. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 31,61%	<p>1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan prosentase sebesar 49,04% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.574.958.622,- dari target realisasi sebesar Rp. 5.251.263.275,-</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 1.556.171.654,- pada kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kurang sebesar Rp. 1.175.791.182,- 3. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK sebesar Rp. 781.803.600,- 4. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA sebesar Rp. 213.468.568,-
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian	
5. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 38,25%	<p>1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan prosentase sebesar 53,99% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2893073987,- dari target realisasi sebesar Rp. 5358222362,-</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 629.429.545,- pada kegiatan Kegiatan

CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
	<p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kurang sebesar Rp. 554.300.844,-</p> <p>2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN sebesar Rp. 1.446.797.459,-</p>

CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
6. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 40,38%	<p>1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Rendah (R) dengan prosentase sebesar 55,17% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.925.907.938,- dari target realisasi sebesar Rp. 3.490.921.676,-</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <p>3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 1.042.011.646,- pada kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kurang sebesar Rp. 930.033.137,-</p> <p>4. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL sebesar Rp. 282.958.209,-</p> <p>5. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL sebesar Rp. 72.089.980,-</p> <p>6. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL sebesar Rp. 51.241.072,-</p>

CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
7. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 7,57%	1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan prosentase sebesar 8,42% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.110.678.551,- dari target realisasi sebesar Rp. 25.055.404.361,-

CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
	<p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 1.021.813.134,- pada kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kurang sebesar Rp. 781.591.733,- 2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN sebesar Rp. 595773800 pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota sebesar Rp. 377.598.800,- 3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN sebesar Rp. 20.245.046.548,- 4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN sebesar Rp. 200.000.000,- 5. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA sebesar Rp. 323.101.458,- 6. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA sebesar Rp. 417.158.900,-
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
8. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 46,10%	1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sedang (S) dengan prosentase sebesar 67,06% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.917.467.091,- dari target realisasi sebesar Rp 2.859.503.701,-
Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	
9. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 6,21%	1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan prosentase sebesar 21,41% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.882.166.250,- dari target

CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
	<p>realisasi sebesar Rp. 13.463.753.676,-</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p>
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
Sekretariat Daerah	
<p>10. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 38,59%</p> <p>Tingkat capaian kinerja sangat rendah dipengaruhi oleh:</p> <p>1. Kinerja kegiatan Pengadaan barang dan jasa bersumber dari APBD. Dari 2 kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.330.000.000,- ,sampai triwulan II tahun 2022 belum ada kegiatan dalam status kontrak. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan pengadaan berdampak pada progress daya serap anggaran dan mempengaruhi tahapan kegiatan dan program dalam proses mencapai kinerja.</p>	<p>1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Rendah (R) dengan prosentase sebesar 63,25% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 23.917.629.301,- dari target realisasi sebesar Rp. 37.812.635.220,-</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <p>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 7.974.116.900,-pada kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kurang sebesar Rp. 2.561.811.780,- Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 724.919.041, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 874.802.567,-, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 155.542.195,-, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 1.742.477.000,-, kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 474.882.637,-,kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah sebesar Rp. 323.212.659,-, kegiatan Penataan</p>

CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
	<p>Organisasi sebesar Rp. 242.874.584,-</p> <p>2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT sebesar Rp. 5.522.880.538,- pada kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual sebesar Rp. 5.072.523.789,-</p> <p>3. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN sebesar Rp. 398.008.481,- pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD sebesar Rp. 166.255.095,-.</p>
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
Sekretariat DPRD	
<p>11. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 43,61%</p>	<p>1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Rendah (R) dengan prosentase sebesar 54,69% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 14.390.614.280,- dari target realisasi sebesar Rp. 26.312.015.014,-</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <p>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 8.386.741.146,- pada kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kurang sebesar Rp. 1.106.792.744,- pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 147.829.790,-, pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp. 185.714.000,-, pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.903.165.000,- pada kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD pada sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD sebesar Rp. 4.040.753.516,- dan pada kegiatan Layanan Administrasi DPRD pada sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD sebesar</p>

CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
	<p>Rp. 219.000.000,-</p> <p>2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp. 3.534.659.588,- pada kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran sebesar Rp. 375.755.170,-, pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp. 1242.333.595,-, pada kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD sebesar Rp. 389.153.710,- pada kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebesar Rp. 978.534.955,-, pada kegiatan Fasilitas Tugas DPRD sebesar Rp. 222.582.693,-</p>
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
Inspektorat	
12. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 41,03	<p>1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan prosentase sebesar 60,55% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 4.937.595.965,- dari target realisasi sebesar Rp. 8.154.082.968,-</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <p>3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 2.162.904.428,- pada kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kurang sebesar Rp. 1.128.007.717,-</p> <p>4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN sebesar Rp. 758.794.575,-</p> <p>5. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI sebesar Rp. 294.788.000,-</p>
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
13. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 31,92%	1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan prosentase sebesar 48,02% dengan

CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
	<p>capaian realisasi sebesar Rp.3.416.055.726,- dari target realisasi sebesar Rp. 7.113.116.247,-</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <p>6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 1.172.390.179,- pada kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kurang sebesar Rp. 930689139,-</p> <p>7. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH sebesar Rp. 1.238.756.132,-</p> <p>8. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA sebesar Rp. 1.285.914.210,-</p>
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
Bapelitbangda	
14. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 32,31%	<p>1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan prosentase sebesar 52,61% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.904.263.885,- dari target realisasi sebesar Rp. 5.520.395.288,-</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <p>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 1.277.763.971,- pada kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kurang sebesar Rp. 1.031.864.992,-</p> <p>2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH sebesar Rp. 520.517.778,-</p>
CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA
BPKD	

CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
15. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 23,82%	<p>1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan prosentase sebesar 83,61% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 99597461758,- dari target realisasi sebesar Rp. 83270543970,-</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <p>3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 6034749138,- pada kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kurang sebesar Rp. 5.403.396.455,-</p> <p>4. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH sebesar Rp. 10.117.992.230,- pada kegiatan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 9.682.422.849,-</p>
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
BAPENDA	
16. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 41,19%	<p>1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sedang (S) dengan prosentase sebesar 73,90% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 5.052.565.403,- dari target realisasi sebesar Rp. 6.892.531.094,-</p> <p>Tingkat capaian dikategorikan baik dimana peletakan anggaran kas dapat disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan secara efektif.</p>
Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan	

CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
17. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 42,75%	1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sedang (S) dengan prosentase sebesar 66,71% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 4.789.763.200,- dari target realisasi sebesar Rp. 3.195.025.735,- Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
KECAMATAN ANGKONA	
18. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 50,34%	1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Rendah (SR) dengan prosentase sebesar 65,26% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.371.883.923,- dari target realisasi sebesar Rp. 2.102.207.715,- Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada : 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA pada kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kurang sebesar Rp. 434.374.931,-
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
KECAMATAN MALILI	
19. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 46,10	1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sedang (S) dengan prosentase sebesar 72,36% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1779021375,- dari target realisasi sebesar Rp. 2458418509,- Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada : 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA pada kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kurang sebesar Rp. 434.374.931,-

CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
KECAMATAN NUHA	
20. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 45,84%	<p>1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Rendah (R) dengan prosentase sebesar 59,33% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.813.348.589,- dari target realisasi sebesar Rp. 3.056.168.204,-</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 1.193.172.782,- pada kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kurang sebesar Rp. 1.101.551.289,-
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
KECAMATAN WASUPONDA	
21. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 45,84%	<p>1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan prosentase sebesar 47,60% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 571.059.791,- dari target realisasi sebesar Rp. 1.199.740.122,-</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 687.197.137,- pada kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kurang sebesar Rp. 574.431.404,-
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
KECAMATAN TOWUTI	
22. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah	1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Rendah

CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
(SR) dengan capaian 34,83%	(R) dengan prosentase sebesar 62,68% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.375.023.088,- dari target realisasi sebesar Rp. 2.193.823.832,- Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada : 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 687.197.137,-pada kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kurang sebesar Rp. 574.431.404,-

CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
KECAMATAN MANGKUTANA	
23. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 47,58%	1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sedang (S) dengan prosentase sebesar 68,86% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.434.088.468,- dari target realisasi sebesar Rp. 2.082.547.563,- Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada : 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 636.505.479,- pada kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kurang sebesar Rp. 559.358.856,-
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
KECAMATAN TOMONI TIMUR	

24. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 49,05%	1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan prosentase sebesar 62,08% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.270.005.558,- dari target realisasi sebesar Rp. 2.045.592.148,- Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada : 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp. 775.586.590,- pada kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan
--	---

	tunjangan kurang sebesar Rp. 724.636.010,-
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
KECAMATAN KALAENA	
25. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 54,98%	<p>1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sedang (S) dengan prosentase sebesar 75,72% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.387.348.596,- dari target realisasi sebesar Rp. 1.832.282.133,-</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <p>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kurang sebesar Rp. 777.302.289,-</p>
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
KECAMATAN BURAU	
26. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 48,00%	<p>1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Sedang(S) dengan prosentase sebesar 70,40% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.591.502.378,- dari target realisasi sebesar Rp. 2.260.749.020,-</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <p>2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEBESAR Rp. 669.246.642,- pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kurang sebesar Rp. 585.253.044,-</p>
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
KECAMATAN WOTU	
27. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 40,16%	1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Rendah (R) dengan prosentase sebesar 62,68% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.375.023.088,- dari target realisasi

	<p>sebesar Rp. 2.193.823.832,-</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <p>3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEBESAR Rp. 818.800.744,- pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kurang sebesar Rp. 580.122.863,-</p>
CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
KECAMATAN TOMONI	
<p>28. Tingkat capaian rata-rata dikategorikan Sangat Rendah (SR) dengan capaian 48,03%</p>	<p>1. Tingkat capaian realisasi anggaran dikategorikan Rendah (R) dengan prosentase sebesar 65,04% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.108.930.406,- dari target realisasi sebesar 3.242.515.102,-</p> <p>Tingkat capaian dipengaruhi oleh peletakan anggaran kas yang kurang efektif pada :</p> <p>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kurang sebesar Rp. 713.461.133,-</p>

BAB VII PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II Kabupaten Luwu Timur tahun 2022, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka capaian kinerja sampai dengan Triwulan II berada pada kategori capaian “Sangat Rendah” dengan nilai 36,91%.
2. Berdasarkan laporan realisasi anggaran masing-masing OPD secara total persentase, daya serap sampai dengan Triwulan II (30 Juni 2022) mencapai 58,45%, sehingga capaian ini berada pada tingkatan kategori **“Sangat Rendah”**.
3. Capaian kinerja OPD belum dapat menggambarkan secara terukur pencapaian kinerja program dan kegiatan sehingga korelasi dan saling keterkaitan kinerja antara program, kegiatan, serta sub kegiatan belum dapat dijelaskan secara detail.
4. Meskipun secara perumusan dapat diperoleh angka pencapaian kinerja tetapi lebih mengarah pada akumulasi pencapaian kinerja sub kegiatan.
5. Terdapat sisa anggaran tahun berjalan yang cukup besar menggambarkan kurang efektifnya belanja pada pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dan kurang tepatnya peletakan anggaran pada kegiatan/sub kegiatan sehingga mempengaruhi tingkat realisasi belanja pada tingkatan OPD.
6. Terdapat belanja pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan dalam proses pengadaannya di UKPBJ menunjukkan kelemahan dalam rencana pengadaan pada internal OPD serta koordinasi yang kurang efektif dengan unit layanan pengadaan (UKPBJ).
7. Terdapat belanja Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Perbantuan (TP) yang belum dapat dilaksanakan sesuai perencanaan yang berpotensi mengalami keterlambatan mengingat adanya ketentuan batas akhir kontrak untuk dana alokasi tersebut.
8. Terdapat kelemahan dan keterlambatan OPD dalam melakukan evaluasi dan pengendalian internal secara reguler dalam mengidentifikasi dan mengungkap serta mencari solusi permasalahan sehingga pencapaian realisasi keuangan dan kinerja belum dapat disajikan secara baik.

9. Terdapat penganggaran kas untuk belanja gaji dan tunjangan yang tidak efektif untuk sebagian besar OPD.
10. Terdapat 17 OPD dengan tingkat capaian kinerja di bawah 10%
11. Terdapat 6 OPD dengan tingkat capaian realisasi keuangan dibawah 10%
12. Pencapaian realisasi anggaran dan pencapaian kinerja ini tetap meninggalkan catatan untuk menjadi perbaikan kedepan sekaitan dengan belum optimalnya pencapaian target dan realisasi belanja sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan agar menjadi pertimbangan saat penyusunan laporan pada triwulan berikutnya

7.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dari pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan IIKabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Agar seluruh OPD lebih cermat dalam menentukan indicator kinerja yang lebih terukur dan penentuan target kinerja awal yang efektif n agar pencapaian kinerja Triwulan Iltahun berjalan dapat dioptimalkan
2. Sekaitan dengan belum optimalnya pencapaian target dan realisasi belanja sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan agar menjadi pertimbangan dalam peletakan anggaran
3. Agar seluruh OPD Mengoptimalkan penggunaan instrumen pengendalian dan evaluasi secara regular pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan hasil untuk efektifitas pencapaian realisasi keuangan dan kinerja
4. Agar Kepala OPD mengambil langkah-langkah kongkrit terkait pengendalian sekaitan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap triwulannya;
5. Agar Kepala OPD melakukan evaluasi internal terkait target-target yang tidak terlaksana dan melaporkan secara tertulis sesuai format evaluasi pelaksanaan Renja-PD triwulanan.
6. Agar seluruh OPD lebih aktif dalam penyusunan Dokumen Pengendaliandan Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga dapat meminimalisir permasalahan ke depannya.
7. Agar seluruh seluruh OPD mempedomani Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Rencana Kas terhadap pencapaian target pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dan mengambil langkah- langkah percepatan pencapaian target pelaksanaankegiatan/sub kegiatan.
8. Agar seluruh OPD melakukan penyerapan anggaran sesuai target anggaran kas yang telah ditetapkan per triwulan.
9. Agar seluruh OPD dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran agar senantiasa menjaga konsistensi baik program maupun pagu pada dokumen RPJMD, RKPD, Renja sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sehingga keselarasan antar dokumen dapat terpenuhi.
10. Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur perencana pada OPD dan Bapelitbangda dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan hasil.
11. Agar Kepala OPD untuk memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan untuk selanjutnya melakukan koordinasi dan konsultasi secara intens ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) sekaitan dengan pengadaan barang/jasa.
12. Agar Lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi bidang pada Bapelitbangda sebagai koordinator dan integrator OPD mitra.Memanfaatkan Forum/Rapat Koordinasi sebagai media sharing bersama atas permasalahan yang ada guna mendapatkan solusi yang terbaik, cepat dan tepat.
13. Agar seluruh OPD lebih cermat dalam menyusun rencana kerja,kordinasi yang efektif, pelaksanaan kerja yang terukur,serta monitoring dan pengendalian kemajuan pekerjaan secara regular pada kegiatan pengadaan barang jasa sehingga

permasalahan pembatalan, keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang jasa dapat diminimalisir.

14. Melakukan perencanaan yang matang dan pelaksanaan belanja tepat waktu agar serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat direalisasikan optimal.
15. Agar seluruh OPD melakukan pendataan dan perhitungan yang tepat pada belanja gaji dan tunjangan agar tidak menyisakan belanja yang tidak efektif dan efisien
16. Dengan tersusunnya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2022, diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2022 yang lebih tepat, cermat, efisien, efektif dan terukur.

LAMPIRAN

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022